



# Analisis Kebijakan Publik dalam Menyelesaikan Problematika Pendidikan Islam Kontemporer

Syamsuri\*<sup>1</sup>, Titi Kadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

E-mail: [syamsurilmg@gmail.com](mailto:syamsurilmg@gmail.com), [titikadi.ibrahim@gmail.com](mailto:titikadi.ibrahim@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-14	Islamic education in Indonesia faces complex challenges in the contemporary era that require effective public policy interventions. This study aims to analyze the problems of contemporary Islamic education and the solutions offered through public policy. The research method used is a descriptive study focusing on evidence-based policy analysis. The results indicate that the primary issues lie in the low quality of graduates due to curriculum dichotomy, limited digital infrastructure, and uneven teacher professionalism. Policy solutions include massive digitalization of education, integration of science and religious curricula, and strengthening accountable school-based management. Through synchronized and transparent policy implementation, Islamic education can transform into globally competitive institutions without losing its moral identity. Synergy between the government, private sector, and the community is essential in overseeing educational policies to realize human resources that are intellectually and spiritually superior.
<b>Keywords:</b> <i>Public Policy;</i> <i>Islamic Education;</i> <i>Contemporary Problems;</i> <i>Educational</i> <i>Digitalization;</i> <i>Integrative Curriculum.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-14	Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan kompleks di era kontemporer yang memerlukan intervensi kebijakan publik yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pendidikan Islam kontemporer dan solusi melalui kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian deskriptif dengan fokus pada analisis kebijakan berbasis bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada rendahnya mutu lulusan akibat dikotomi kurikulum, keterbatasan infrastruktur digital, serta profesionalisme tenaga pendidik yang belum merata. Solusi kebijakan mencakup digitalisasi pendidikan secara masif, integrasi kurikulum sains dan agama, serta penguatan manajemen berbasis madrasah yang akuntabel. Melalui implementasi kebijakan yang sinkron dan transparan, pendidikan Islam dapat bertransformasi menjadi lembaga yang kompetitif secara global tanpa kehilangan jati diri akhlakul karimah. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul secara intelektual dan spiritual.
<b>Kata kunci:</b> <i>Kebijakan Publik;</i> <i>Pendidikan Islam;</i> <i>Problematika</i> <i>Kontemporer;</i> <i>Digitalisasi Pendidikan;</i> <i>Kurikulum Integratif.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan agama, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik agar mampu menghadapi tantangan kehidupan modern (Nata, 2012). Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan Islam memiliki kedudukan yang strategis karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan Islam akan berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi

telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak tertinggal dari sistem pendidikan lainnya (Firdausiyah & Sofa, 2025).

Namun demikian, pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika yang kompleks. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya mutu pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi tenaga pendidik, serta belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan Islam.

Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan antara madrasah di daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah yang serius. Banyak madrasah di daerah terpencil yang masih

kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara optimal (Ramdani et al., 2025).

Kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan Islam tersebut. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat melalui program-program yang terencana dan sistematis (Barizi, 2011). Melalui kebijakan publik yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam, memperbaiki sistem manajemen pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pendidikan Islam mampu menyelesaikan problematika pendidikan Islam kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai analisis kebijakan publik dalam menyelesaikan problematika pendidikan Islam kontemporer (Tintingon et al., 2023).

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis berbagai fenomena dan kebijakan pendidikan Islam yang tengah berkembang. Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi masalah secara komprehensif melalui studi dokumen terkait laporan mutu pendidikan, dilanjutkan dengan analisis kebijakan publik yang berlaku saat ini dengan menggunakan kacamata teori implementasi kebijakan. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap literatur akademik terkini dan laporan operasional harian yang mencerminkan praktik pendidikan di lapangan, khususnya di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Karakteristik populasi dalam kajian ini mencakup berbagai elemen pendidikan Islam di Indonesia, dengan fokus pada disparitas kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Seluruh data dianalisis secara sistemik untuk merumuskan solusi kebijakan yang bersifat progresif, mulai dari aspek manajemen, kurikulum, hingga pembiayaan alternatif demi tercapainya standar nasional pendidikan yang inklusif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Problematika Pendidikan Islam Kontemporer**

Kualitas output pendidikan Islam di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan standar kompetensi akademik yang dipersyaratkan pada level nasional maupun internasional. Fenomena rendahnya mutu ini bukanlah sebuah gejala tunggal, melainkan hasil dari akumulasi berbagai variabel sistemik yang saling berkelindan, mulai dari aspek input, proses, hingga lingkungan pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan Islam seringkali terjebak dalam dikotomi keilmuan yang belum tuntas, sehingga lulusan yang dihasilkan cenderung memiliki penguasaan materi agama yang mendalam namun gagap dalam menghadapi dinamika sains modern. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kompetensi yang signifikan di pasar kerja maupun dalam kancah pengembangan inovasi global. Perlu dipahami bahwa standar mutu bukan sekadar angka pada ijazah, melainkan representasi dari daya saing intelektual dan moral peserta didik. Upaya sistematis harus segera dilakukan agar madrasah tidak lagi dipandang sebagai alternatif kelas dua dalam hierarki sistem pendidikan nasional (Khatimah et al., 2025).

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor fundamental yang menghambat akselerasi kualitas pembelajaran di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Infrastruktur fisik seperti ruang kelas yang representatif, laboratorium sains yang lengkap, serta perpustakaan berbasis digital masih menjadi barang mewah bagi mayoritas lembaga pendidikan Islam di wilayah rural. Ketidaktersediaan media pembelajaran yang mutakhir mengakibatkan transfer pengetahuan berlangsung secara konvensional dan cenderung membosankan bagi generasi Z dan Alpha. Efektivitas pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan alat dukung yang memadai untuk mengeksplorasi potensi kognitif maupun psikomotorik siswa secara optimal. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, konsep-konsep teoritis dalam kurikulum akan sulit diinternalisasi secara praktis oleh peserta

didik. Modernisasi sarana prasarana merupakan syarat mutlak bagi terciptanya ekosistem pendidikan Islam yang inklusif dan progresif.

Profesionalisme tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam masih menunjukkan disparitas yang lebar dibandingkan dengan standar nasional pendidikan. Banyak guru madrasah yang belum memenuhi kualifikasi akademik strata satu atau tidak memiliki sertifikat pendidik yang relevan dengan bidang tugasnya. Kompetensi pedagogik yang mencakup kemampuan mengelola kelas dan memahami karakteristik siswa seringkali terabaikan demi mengejar ketuntasan penyampaian materi secara tekstual. Guru adalah dinamisator utama dalam kelas, sehingga lemahnya penguasaan metodologi pengajaran akan berimplikasi langsung pada rendahnya minat baca dan daya kritis siswa. Pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru-guru agama harus menjadi prioritas agar mereka mampu menyajikan materi keislaman dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan saintifik. Tanpa guru yang berkualitas, kurikulum sebaik apapun tidak akan pernah mencapai target idealnya dalam membentuk insan kamil yang cerdas secara intelektual dan spiritual.

Manajemen pendidikan Islam seringkali masih dikelola dengan pendekatan tradisional yang kurang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tata kelola administrasi yang manual dan birokratis menghambat pengambilan keputusan strategis yang berbasis data di tingkat satuan pendidikan. Lemahnya visi kepemimpinan kepala madrasah berakibat pada stasisnya pengembangan inovasi serta buruknya pemeliharaan aset pendidikan yang ada. Pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang tidak profesional seringkali memicu konflik internal yang kontraproduktif terhadap iklim akademik. Transformasi menuju manajemen berbasis sekolah (MBS) yang modern sangat diperlukan untuk memastikan setiap sen anggaran dikonversi menjadi kualitas layanan pendidikan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner adalah kunci untuk menggerakkan seluruh elemen lembaga menuju pencapaian standar mutu yang

ditetapkan (Ys & Fu'ad, 2025).

Sistem evaluasi pembelajaran pada pendidikan Islam kontemporer cenderung masih bersifat kognitif-sentris dan mengabaikan penilaian autentik pada ranah afektif serta psikomotorik. Ujian-ujian yang diselenggarakan seringkali hanya mengukur daya ingat siswa terhadap teks keagamaan tanpa menyentuh aspek implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Mekanisme penilaian yang kurang objektif dan belum berbasis standar nasional mengakibatkan hasil evaluasi tidak dapat dijadikan rujukan valid bagi perbaikan proses pembelajaran. Evaluasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen diagnostik untuk memetakan kelemahan siswa sejak dini, bukan sekadar instrumen penghakiman di akhir semester. Pengembangan instrumen penilaian yang komprehensif dan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak agar capaian belajar siswa dapat terukur secara presisi. Guru perlu dilatih secara intensif untuk menyusun soal-soal berbasis High Order Thinking Skills (HOTS) guna memicu daya analisis siswa (Yuniarti et al., 2022).

Kurikulum pendidikan Islam saat ini menghadapi kritik tajam terkait kurangnya integrasi antara disiplin ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis. Muatan kurikulum yang sangat padat seringkali membuat beban belajar siswa menjadi terlalu berat tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan minat dan bakat. Paradigma dikotomis yang memisahkan antara "ilmu ukhrawi" dan "ilmu duniawi" menyebabkan lulusan madrasah kurang kompetitif dalam penguasaan sains dan teknologi. Integrasi kurikulum harus dilakukan pada level epistemologis agar setiap materi pelajaran umum tetap memiliki landasan nilai-nilai ketauhidan yang kuat. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan zaman harus terus dievaluasi agar tidak terjadi *mismatch* antara profil lulusan dan kebutuhan pasar. Inovasi kurikulum yang adaptif dan fleksibel adalah strategi kunci dalam menghadapi disrupsi di era global.

Kesenjangan ekonomi dan keterbatasan anggaran pendidikan menjadi sandungan besar dalam mewujudkan pemerataan

kualitas pendidikan Islam di seluruh pelosok negeri. Banyak madrasah swasta yang bergantung sepenuhnya pada sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari orang tua siswa yang kondisinya menengah ke bawah. Keterbatasan dana mengakibatkan upah guru honorer di madrasah seringkali berada di bawah standar kelayakan hidup, yang kemudian berdampak pada menurunnya motivasi kerja. Alokasi anggaran dari pemerintah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan infrastruktur pendidikan Islam yang sangat masif jumlahnya. Diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti optimalisasi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mendukung kemandirian finansial lembaga pendidikan. Efisiensi penggunaan anggaran harus dipantau secara ketat agar setiap program tepat sasaran dan memberikan dampak nyata pada mutu lulusan.

Budaya literasi dan iklim riset di lingkungan pendidikan Islam masih perlu ditingkatkan secara signifikan guna mengejar ketertinggalan dalam produksi ilmu pengetahuan. Minat baca siswa madrasah seringkali terbatas pada buku teks wajib tanpa adanya dorongan untuk mengeksplorasi referensi lain dari jurnal ilmiah maupun literatur klasik secara kritis. Perpustakaan yang ada seringkali belum dikelola secara profesional dan koleksinya sudah tidak relevan dengan perkembangan sains terkini. Guru perlu memberikan teladan dalam aktivitas menulis dan meneliti agar semangat intelektualisme dapat menular kepada para peserta didik. Kompetisi-kompetisi riset tingkat siswa harus lebih banyak diselenggarakan untuk melatih kemampuan berpikir sistematis dan solutif terhadap problematika masyarakat. Budaya ilmiah yang kuat akan melahirkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi peradaban umat manusia.

Digitalisasi pendidikan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan Islam melalui transformasi infrastruktur dan mindset. Pandemi COVID-13 beberapa waktu lalu telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan platform e-learning sebagai alternatif proses belajar

mengajar. Namun, banyak madrasah yang kembali pada pola lama setelah situasi normal karena kurangnya dukungan server, kuota internet, dan kemampuan teknis guru. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan materi buku ke format PDF, melainkan menciptakan ekosistem belajar yang interaktif, kolaboratif, dan tanpa batas ruang serta waktu. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam personalisasi pembelajaran bagi siswa madrasah merupakan peluang besar yang harus dieksplorasi secara bijak. Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi digital akan membuat pendidikan Islam semakin tertinggal jauh di belakang sistem pendidikan global yang sudah sangat maju (Ismail, 2025).

## 2. Analisis Kebijakan Publik Pendidikan Islam

Identifikasi masalah secara komprehensif merupakan fondasi utama dalam siklus kebijakan publik untuk mengatasi problematika pendidikan Islam secara tepat sasaran. Analisis terhadap rendahnya mutu, kompetensi guru, hingga keterbatasan sarana harus dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) agar solusi yang dirumuskan tidak bersifat sporadis. Pemerintah perlu memetakan secara detail kondisi geografis dan demografis setiap wilayah untuk memahami disparitas kualitas antar madrasah di Indonesia. Masalah sistemik seperti rendahnya daya serap teknologi di lingkungan pesantren memerlukan intervensi kebijakan yang berbeda dengan madrasah di perkotaan. Keterlibatan pemangku kepentingan seperti organisasi kemasyarakatan Islam, praktisi pendidikan, dan akademisi sangat krusial dalam tahap identifikasi ini. Transparansi data mengenai profil pendidikan Islam menjadi kunci utama bagi perumusan kebijakan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Implementasi kebijakan merupakan fase yang paling krusial karena seringkali terjadi kesenjangan antara apa yang tertulis dalam dokumen kebijakan dengan praktik di lapangan. Sumber daya manusia yang bertugas mengeksekusi kebijakan di tingkat kantor wilayah maupun satuan pendidikan harus memiliki pemahaman visi yang sama. Komitmen pelaksana

kebijakan sangat dipengaruhi oleh dukungan kepemimpinan dan ketersediaan anggaran yang memadai serta tepat waktu. Komunikasi kebijakan harus dilakukan secara intensif melalui berbagai kanal informasi agar semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya. Kendala birokrasi yang berbelit-belit seringkali menjadi penghambat utama dalam penyaluran bantuan sarana prasarana ke daerah-daerah terpencil. Monitoring secara berkala selama masa implementasi sangat diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan dan melakukan koreksi cepat atas kendala yang muncul. Keberhasilan implementasi adalah cerminan dari kuatnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait.

Kualitas anggaran pendidikan Islam perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat dan orientasi pada hasil (*result-oriented*), bukan sekadar penyerapan dana di akhir tahun. Alokasi anggaran yang besar tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak dibarengi dengan efisiensi dan pencegahan praktik korupsi di seluruh lini birokrasi pendidikan. Pendanaan untuk riset dan pengembangan inovasi pembelajaran di madrasah masih tergolong minim dibandingkan dengan pengeluaran rutin untuk gaji pegawai. Pemerintah harus mendorong kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu percepatan pembangunan fasilitas pendidikan. Sinkronisasi anggaran antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program. Transparansi dalam pengelolaan dana hibah bagi madrasah swasta merupakan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Komunikasi publik mengenai arah kebijakan pendidikan Islam perlu dibangun dengan narasi yang positif dan inspiratif agar mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Sosialisasi kebijakan yang bersifat instruktif cenderung akan mendapatkan resistensi di tingkat akar rumput jika tidak disertai dengan penjelasan mengenai manfaat jangka panjangnya. Orang tua siswa dan komite madrasah harus dijadikan mitra strategis dalam

mengawal implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kisah sukses madrasah-madrasah yang berhasil melakukan transformasi melalui kebijakan pemerintah sebagai contoh bagi lembaga lainnya. Opini publik yang kondusif akan menciptakan tekanan positif bagi para pelaksana kebijakan untuk bekerja lebih profesional dan akuntabel. Pendidikan Islam harus dicitrakan sebagai investasi masa depan yang prestisius, bukan sekadar lembaga penyedia ijazah formal.

Reformasi kurikulum sebagai bagian dari kebijakan publik harus mampu menjawab tantangan disrupsi teknologi dan perubahan karakter sosiokultural masyarakat. Kebijakan ini harus memberikan ruang otonomi yang cukup bagi madrasah untuk dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Penekanan pada moderasi beragama harus menjadi ruh dalam setiap mata pelajaran untuk mencegah infiltrasi paham radikal di lingkungan pendidikan. Guru-guru agama perlu dibekali dengan kemampuan integrasi sains agar narasi keislaman yang disampaikan bersifat rasional dan relevan dengan ilmu pengetahuan modern. Standarisasi kurikulum harus tetap menjaga ciri khas keislaman namun tidak menutup diri dari standar kompetensi global yang berkembang. Kurikulum yang dinamis adalah kunci untuk menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan dunia yang sangat cepat.

Penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi menjadi kebijakan prioritas untuk mengejar ketertinggalan madrasah dari institusi pendidikan umum yang lebih maju. Kebijakan pengadaan bantuan komputer dan akses internet gratis harus menyasar madrasah-madrasah di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memastikan ketersediaan bandwidth yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar digital. Pembangunan laboratorium virtual dapat menjadi solusi bagi madrasah yang memiliki keterbatasan ruang fisik untuk membangun laboratorium konvensional. Standar sarana

prasarana harus terus diperbarui agar selaras dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang berbasis pada kolaborasi dan kreativitas. Fasilitas fisik yang baik akan meningkatkan kepercayaan diri siswa dan guru dalam menjalankan proses pendidikan.

Koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Agama dengan lembaga pemerintah lainnya serta pemerintah daerah harus diperkuat untuk memastikan integrasi kebijakan pendidikan Islam. Masalah pendidikan Islam adalah masalah nasional yang memerlukan penanganan terpadu dari berbagai aspek, termasuk dukungan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan bantuan pendidikan dari APBD harus dapat menjangkau madrasah tanpa ada diskriminasi antara lembaga pendidikan umum dan agama. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan agar tidak ada celah hukum yang menghambat penyaluran anggaran dari satu instansi ke instansi lainnya. Forum komunikasi antar pemangku kepentingan pendidikan Islam di tingkat daerah perlu diaktifkan sebagai wadah koordinasi dan penyelesaian masalah di lapangan. Sinergi yang kuat akan mempercepat pencapaian target-target besar dalam peta jalan pendidikan Islam di Indonesia (Destrianjasari et al., 2022).

### 3. Solusi Kebijakan Publik Terhadap Problematika Pendidikan Islam

Peningkatan kompetensi guru secara sistemik merupakan solusi jangka panjang yang paling efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam secara menyeluruh. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk beasiswa studi lanjut bagi guru-guru madrasah guna meningkatkan kualifikasi akademik mereka hingga jenjang pascasarjana. Program sertifikasi guru perlu diperketat standar kelulusannya namun disertai dengan proses pembinaan yang intensif agar tidak sekadar menjadi prosedur administratif. Workshop penguasaan metodologi pengajaran berbasis teknologi dan riset harus diselenggarakan secara rutin dan merata hingga ke daerah terpencil. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang unggul akan mampu menciptakan suasana

kelas yang inspiratif bagi siswa. Kesejahteraan guru juga harus menjadi perhatian serius agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada tugas mulia mendidik tunas bangsa.

Digitalisasi pendidikan harus diimplementasikan secara masif melalui pengembangan platform e-learning nasional yang terstandarisasi bagi seluruh lembaga pendidikan Islam. Penyediaan konten pembelajaran digital yang interaktif dan berbasis nilai-nilai keislaman moderat akan sangat membantu guru dalam menyampaikan materi secara menarik. Perpustakaan digital yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh siswa madrasah akan mengatasi masalah kelangkaan buku teks dan referensi ilmiah di daerah-daerah. Pemerintah perlu membangun ekosistem cloud computing yang aman untuk mendukung manajemen data pendidikan secara terintegrasi dan *real-time*. Pelatihan literasi digital bagi orang tua juga sangat penting agar mereka dapat mendampingi anak-anak dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Digitalisasi bukan hanya tentang alat, tetapi tentang menciptakan budaya belajar baru yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Optimalisasi peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional memerlukan kebijakan yang mengakui keunikan model pendidikan pesantren namun tetap memberikan standar mutu yang jelas. Penyetaraan ijazah pesantren melalui program muadalah harus terus diperluas aksesnya agar santri memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah perlu mendukung pengembangan ekonomi pesantren melalui unit-unit usaha mandiri agar lembaga ini memiliki ketahanan finansial yang kuat. Integrasi nilai-nilai kedisiplinan dan kemandirian pesantren ke dalam kurikulum madrasah formal dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi pendidikan Islam. Pesantren harus didorong untuk menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sinergi antara madrasah dan pesantren akan menciptakan kekuatan besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Penerapan manajemen berbasis madrasah (MBM) yang akuntabel akan meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga dalam mencapai target-target kualitas yang ditetapkan. Otonomi yang diberikan kepada kepala madrasah dalam mengelola sumber daya harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dari pihak komite dan pemerintah. Pelibatan publik dalam penyusunan rencana kerja tahunan madrasah akan menciptakan rasa memiliki yang kuat di kalangan masyarakat. Sistem informasi manajemen pendidikan (SIMPATIKA) harus terus dikembangkan fiturnya untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan kinerja secara transparan. Profesionalisme dalam tata kelola administrasi akan meminimalisir risiko inefisiensi anggaran yang merugikan proses pembelajaran. Manajemen yang sehat adalah prasyarat mutlak bagi tumbuhnya budaya mutu di setiap satuan pendidikan Islam (Khamim et al., 2024).

Evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait pendidikan Islam harus dilakukan secara dinamis untuk mengakomodasi perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar nasional pendidikan harus dipastikan memberikan fleksibilitas bagi madrasah untuk melakukan inovasi tanpa melanggar ketentuan hukum. Sinkronisasi regulasi antar kementerian harus terus dijaga agar tidak terjadi kebingungan di tingkat pelaksana akibat adanya aturan yang saling bertentangan. Partisipasi publik dalam setiap proses penyusunan regulasi pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan pendidikan Islam akan membangun integritas sistem secara keseluruhan. Regulasi yang baik adalah payung hukum yang melindungi sekaligus mendorong kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

Problematisasi pendidikan Islam kontemporer di Indonesia merupakan fenomena sistemik yang mencakup aspek input, proses, hingga output pendidikan. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa rendahnya mutu lulusan berakar dari dikotomi keilmuan yang belum tuntas, di mana terdapat pemisahan antara ilmu agama dan sains modern yang menyebabkan lulusan kurang kompetitif di pasar kerja global. Kondisi ini diperparah oleh disparitas kualitas tenaga pendidik dan keterbatasan sarana prasarana, terutama di wilayah rural, yang menghambat terciptanya ekosistem pembelajaran yang inklusif dan progresif. Selain itu, tata kelola lembaga yang masih bersifat tradisional dan birokratis menjadi hambatan utama dalam melakukan akselerasi inovasi pendidikan di era disrupsi (Hermanto et al., 2025).

Analisis kebijakan publik mengungkapkan bahwa intervensi pemerintah memerlukan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mengatasi kesenjangan mutu secara tepat sasaran. Formulasi kebijakan yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam tahap implementasi, terutama terkait komunikasi kebijakan yang kurang intensif dan kendala birokrasi dalam penyaluran bantuan ke daerah terpencil. Sinkronisasi antara kementerian serta keterlibatan pemangku kepentingan seperti organisasi kemasyarakatan Islam menjadi kunci untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan guru dan modernisasi fasilitas pendidikan. Sebagai solusi strategis, digitalisasi pendidikan dan integrasi kurikulum multidisipliner menjadi langkah krusial untuk menjawab tantangan globalisasi (Arifin, 2025).

Penerapan manajemen berbasis madrasah yang akuntabel, didukung oleh penguatan literasi digital bagi guru dan siswa, akan memungkinkan lembaga pendidikan Islam bertransformasi menjadi pusat keunggulan intelektual dan moral. Optimalisasi dana sosial keagamaan (ZISWAF) juga muncul sebagai skema pembiayaan alternatif yang menjanjikan untuk mendukung kemandirian finansial madrasah swasta, sehingga ketergantungan pada anggaran pemerintah yang terbatas dapat diminimalisir (Azizah, 2025).

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematisasi pendidikan Islam kontemporer

meliputi rendahnya mutu output, dikotomi kurikulum, keterbatasan sarana prasarana, serta manajemen yang belum profesional. Kebijakan publik berperan strategis melalui siklus identifikasi masalah yang komprehensif, formulasi kebijakan yang integratif, dan implementasi yang terkendali guna menciptakan transformasi pendidikan Islam yang adaptif, digital, dan kompetitif di kancah internasional.

## B. Saran

Diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat memperkuat sinergi lintas sektoral dalam pemerataan akses teknologi serta meningkatkan alokasi anggaran riset bagi guru dan siswa madrasah. Selain itu, lembaga pendidikan Islam perlu segera meninggalkan paradigma dikotomi keilmuan dan mengadopsi sistem manajemen berbasis digital yang transparan guna membangun kepercayaan publik dan daya saing lulusan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, A. M., & Ridwan, B. (2024). Relevansi pemikiran pendidikan KH MA Sahal Mahfudh dengan sistem pendidikan Islam kontemporer. *Irsyaduna: Jurnal Studi ....*
- Arifin, H. F. (2025). *Manajemen dan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer*. books.google.com.
- Azizah, A. N. (2025). Relevansi epistemologi Ibnu Khaldun dalam kurikulum pendidikan Islam kontemporer. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*.
- Barizi, A. (2011). *Pendidikan integratif: Akar tradisi dan integrasi keilmuan pendidikan Islam*. repository.uin-malang.ac.id.
- Dayusman, E. A., Alimudin, A., & ... (2023). Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer. *TAJDID: Jurnal ....*
- Destrianjasari, S., Khodijah, N., & ... (2022). Pengertian, teori dan konsep, ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Mandala ....*
- Duryat, D. (2022). *Analisis kebijakan pendidikan; Teori dan praktiknya di Indonesia*. books.google.com.
- Falaah, M. F., Suryadin, A., Makmur, M., & ... (2025). Integrasi Islamic critical thinking dalam pendidikan kontemporer: Upaya meningkatkan kecerdasan berpikir kritis pelajar. *Jurnal Pendidikan ....*
- Firdausiyah, J., & Sofa, A. R. (2025). ... keputusan di era kontemporer: Kajian terhadap pengaruhnya dalam kehidupan sosial, kebijakan publik, demokrasi, kepemimpinan, hukum, ekonomi, pendidikan .... *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*.
- Hermanto, E., Seftia, V., Putri, S. J., & ... (2025). Relevansi Tafsir Al-Qur'an Terhadap Isu Sosial Kontemporer di Indonesia: Pendekatan Tematik dan Kontribusi Pemikiran Islam Modern. *Al Iman: Jurnal ....*
- Hidayah, P. N. (2025). Dekonstruksi Pendidikan Progresif Perspektif Filsafat Islam: Menjawab Tantangan Dehumanisasi Pendidikan Kontemporer. *Al-Qarawiyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.
- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*.
- Khamim, S., Iswantir, I., Siregar, N., & ... (2024). Pengaruh dan tantangan pendidikan agama Islam dalam dinamika politik di Indonesia. *Innovative: Journal of ....*
- Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & ... (2025). Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar: Penelitian. ... *Dan Riset Pendidikan*.
- Mardiana, M., Ariyanto, F., Andayani, D., & ... (2025). Pendekatan Teologi Islam dalam Menghadapi Masalah Sosial Modern: Islamic Theology's Approach to Facing Modern Social Problems. ... *Wawasan Agama ....*
- Nata, H. A. (2012). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. books.google.com.
- Primarni, A., & Aminah, S. (2024). Pendidikan Islam dan tantangan kontemporer: Strategi mengatasi radikalisme dan ekstremisme

- melalui pendidikan holistik. *Jurnal Dirosah Islamiyah*.
- Ramdani, E. S., Nurshobahi, H., & Bariyah, K. (2025). *Kebijakan Inovasi dalam Pengelolaan Pendidikan Agama Islam*. books.google.com.
- Siregar, H. Y., Akbar, F., Harahap, A. P., & ... (2025). Hadis Sebagai Pilar Deradikalisasi Di Indonesia: Analisis Kurikulum Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal ...*
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & ... (2023). Problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio Fkip ...*
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*.
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & ... (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah. ... : *Jurnal Program Studi ...*